

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA KUREKSARI KABUPATEN SIDOARJO
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh:

Rengkar Pratiwi

Fakultas Ekonomi-Stie Mahardhika Surabaya

Email: rengkarpratiwi@lcloud.com

ABSTRAK

This research is intended so that other villages can know that there is a simple stimulus that can be developed between the ratio of regional financial independence (X1), and the ratio of effectiveness of PAD (X2) to the welfare of the community (Y) in Sidoarjo. A high ratio value does not necessarily determine the welfare of the community and vice versa a low ratio value also does not necessarily determine the low welfare of the community. This research uses a descriptive quantitative approach that is, research that focuses on testing hypotheses with analysis tools methods of collecting data on observation, interviews and documentation. The test equipment used was multiple regression analysis techniques with Windows SPSS 22. Then the regression coefficient value of the regional financial independence ratio is obtained as big as 0.452, variable pad effectiveness ratio is 0.434. And the F test value of $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3.509 > 3.20$) with a significant level of $0.015 < 0.05$, which means that the variable ratio of financial independence and PAD effectiveness simultaneously affect the welfare of the community. The t test results of the regional financial independence ratio of $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,465 > 2,011$) have a significant value of $0.014 < 0.05$, and the effectiveness ratio of PAD value of $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.959 > 2.011$) has a significant value of $0.022 < 0.05$, which means that the variable the ratio of regional financial independence and pad effectiveness ratio partially affect the welfare of the community.

Keywords: Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Kureksari Village

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan agar Desa lain dapat mengetahui bahwa ada stimulus sederhana yang dapat dikembangkan antara Rasio kemandirian keuangan daerah (X1), dan Rasio efektivitas PAD (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Sidoarjo. Nilai rasio yang tinggi belum tentu menentukan sejahteranya masyarakat begitu sebaliknya nilai rasio yang rendah juga belum tentu menentukan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kuantitatif yaitu, penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesa dengan alat analisa metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat uji yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan windows SPSS 22. Maka diperoleh nilai koefisien regresi variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,452, variabel rasio efektivitas pad sebesar 0,434. Dan nilai uji F sebesar $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,509 > 3,20$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,015 < 0,05$ yang artinya variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hasil Uji t rasio kemandirian keuangan daerah bernilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,465 > 2,011$) memiliki nilai signifikan $0,014 < 0,05$, dan rasio efektivitas PAD bernilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,959 > 2,011$) memiliki nilai signifikan $0,022 < 0,05$, yang artinya variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas pad mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara parsial.

Keywords : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Desa Kureksari

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang sangat pesat ini pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya bisa mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut maka dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, dapat juga mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Dalam PSAP No.4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi, hal ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi.

Tugas pokok pemerintah daerah saat ini yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum pada masyarakatnya. Ketika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut tercapai. Dalam pelaksanaan layanan publik yang baik dibutuhkan dana yang benar-benar ditunjukkan untuk hal tersebut. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat selain memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya, juga memberikan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya yakni dalam mengalokasikan pendapatan yang akan digunakan, termasuk dalam hal pengalokasian dana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin baik daerah dalam mengelola keuangannya maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Layanan publik yang baik diharapkan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dari sisi pendapatan sendiri ada tiga pengukuran kinerja yaitu, pertama anggaran pendapatan yakni batas minimal jumlah target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah. Kedua pertumbuhan pendapatan yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam memperoleh pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Dan ketiga rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dari sisi belanja ada lima pengukuran, dua diantaranya yaitu pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun dan rasio keserasian belanja yang menggambarkan keseimbangan antar belanja. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu,

diharapkan dalam pengolahan pendapatan dan belanja yang ada untuk dialokasikan dengan tepat supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “ Kinerja adalah Keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Keuangan di Desa Kureksari

Metode Analisis Data

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel.1 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00 – 0,25	Instruktif
Rendah	0,26 – 0,50	Konsultatif
Sedang	0,51 – 0,75	Partisipatif
Tinggi	0,76 – 1,00	Delegatif

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel.2 Kategori Nilai efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Efektivitas
>1,00	Sangat Efektif
1,00	Efektif
0,90 - 0,99	Cukup Efektif
0,75 - 0,89	Kurang Efektif
<0,75	Tidak Efektif

Dalam rangka menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa kureksari, dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

α = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisiensi regresi

X_1 = Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

X_2 = Pengaruh Efektivitas PAD

e = Standar error (faktor pengganggu diluar model)

Dari persamaan regresi diatas, selanjutnya akan dilakukan pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu; Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Desa Kureksari

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keungan Pemerintah daerah di Desa Kureksari tahun 2016 – 2018 sesuai dengan rumus, dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2016

Rasio Kemandirian

$$= \frac{213.752.562.969,00}{192.613.916.000,00 + 101.157.748.136,00 + 131.221.156.000,00} \times 100\%$$

$$= 2,937 \%$$

2017

Rasio Kemandirian

$$= \frac{255.037.017.191,46}{192.613.916.000,00 + 106.184.361.088,00 + 156.422.111.000,00} \times 100\%$$

$$= 2,987\%$$

2018

Rasio Kemandirian

$$= \frac{281.742.270.403,00}{192.613.916.000,00 + 109.242.161.033,00 + 181.341.243.000,00} \times 100\%$$

$$= 3,018\%$$

Tahun	Realisasi PAD	Dana Perimbangan	Kemandirian	Pola Hubungan
2016	213.752.562.969,00	424.992.820.136,00	2,937%	Delegatif
2017	255.037.017.191,46	455.220.388.088,00	2,987%	Delegatif
2018	281.742.270.403,00	483.197.320.033,00	3,018%	Delegatif
Rata-rata				

Sumber : data primer diolah penulis, 2019

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Kureksari tahun 2016 – 2018 sesuai dengan rumus, dapat dilihat sebagai berikut:

$$Rasio\ efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

2016

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{1.474.500.636.377,46}{1.427.420.298.727,00} \times 100\%$$

$$= 1,032\%$$

2017

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{1.493.566.716.412,44}{1.440.510.347.829,00} \times 100\%$$

$$= 1,036\%$$

2018

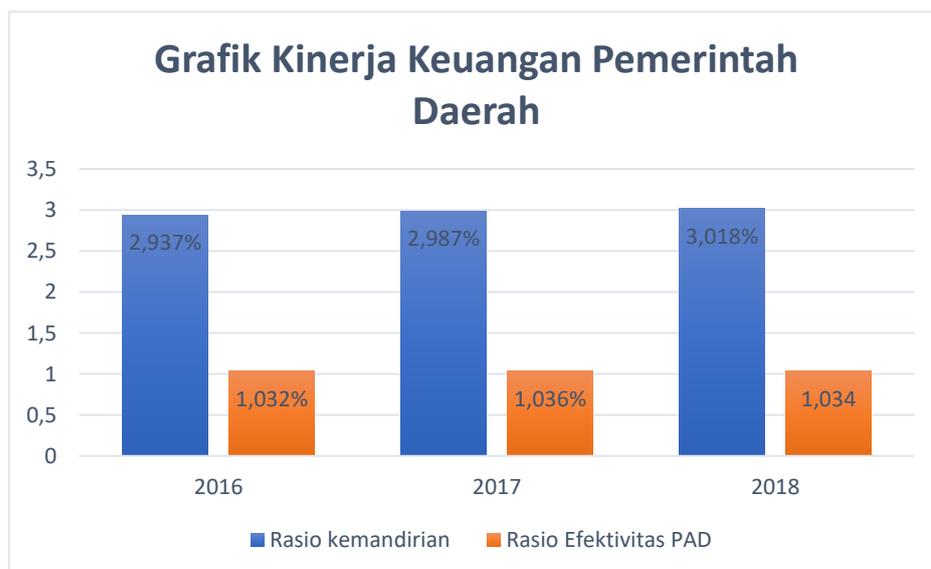
$$Rasio\ Efektivitas = \frac{1.511.631.748.511,50}{1.461.612.418.989,00} \times 100\%$$

$$= 1,034\%$$

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektivitas PAD	Kriteria
2016	1.474.500.636.377,46	1.427.420.298.727,00	1,032%	Sangat Efektif
2017	1.493.566.716.412,44	1.440.510.347.829,00	1,036%	Sangat Efektif
2018	1.511.631.748.511,50	1.461.612.418.989,00	1,034%	Sangat Efektif
Rata-rata				

Sumber : data primer diolah penulis, 2019

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut:



Sumber : data primer diolah penulis, 2019

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kureksari.

Estimasi Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Hasil dari Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	82,725	24,089		33,235	,000		
RasioKemandirianX1	,452	,520	,168	3,465	,014	,950	1,050
RasioEfektivitasX2	,434	,513	,190	3,959	,022	,973	1,029

a. Dependent Variable: KesejahteraanMasyarakatY

Sumber : data primer diolah penulis, 2019

Pada tabel di atas, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen (bebas). Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 82,725 + 0,452 + 0,434 + e$$

Berdasarkan atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 82,725 menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas pad berpengaruh positif variabel independennya. Bila variabel Independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel kesejahteraan masyarakat akan naik atau terpenuhi.
2. Nilai Koefisien rasio kemandirian keuangan daerah untuk variabel X1 sebesar 0,452 yang mengalami kenaikan satu kesatuan, maka kesejahteraan masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,452 atau 45,2 % yang artinya bernilai positif. Rasio kemandirian keuangan daerah (X1) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) mempunyai hubungan positif. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap adanya rasio kemandirian keuangan daerah (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada Kesejahteraan Masyarakat (Y).
3. Nilai koefisien Rasio efektivitas pad untuk variabel X2 sebesar 0,434 yang mengalami kenaikan satu kesatuan, maka Kesejahteraan masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,434 atau 43,4 % yang artinya bernilai positif. Rasio efektivitas pad (X2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) mempunyai hubungan yang positif. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap adanya rasio efektivitas pad (X2) akan mengakibatkan kenaikan pada kesejahteraan masyarakat (Y).

Hasil dari Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,217 ^a	,438	,071	17,222

a. Predictors: (Constant), RasioEfektivitasX2, RasioKemandirianX1

b. Dependent Variable: KesejahteraanMasyarakatY

Sumber : data primer diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,438 atau (43,8 %). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 43,8%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam (X1,X2) mampu menjelaskan sebesar 43,8% variasi variabel dependen (Y). Sedangkan sisanya sebesar 56,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil dari Uji Parsial (uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	82,725	24,089		33,235	,000		
RasioKemandirianX1	,452	,520	,168	3,465	,014	,950	1,050
RasioEfektivasX2	,434	,513	,190	3,959	,022	,973	1,029

a. Dependent Variable: KesejahteraanMasyarakatY

Sumber : data primer di olah penulis,2019

Berdasarkan tabel diatas, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen (bebas) dimana rasio kemandirian keuangan daerah (X1), dan rasio efektivitas pad (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), maka digunakan uji t, dengan menggunakan rumus dimana $df = n - k = 50 - 3 = 47$ maka $t_{tabel} = 2,011$ Hasil dari uji t tersebut yaitu:

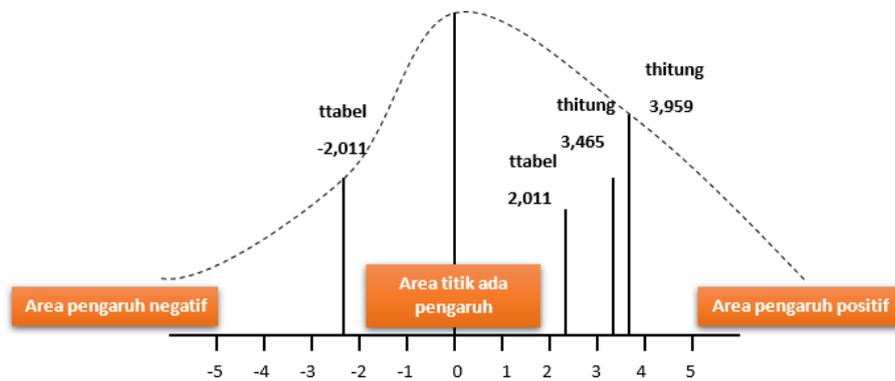
1. pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Dari tabel 4.13 terlihat bahwa t_{hitung} untuk koefisien rasio kemandirian keuangan daerah (X1) adalah 3,465, sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t_{test} , dengan $\alpha = 5\%$ atau sebesar 0,05. Karena dalam penelitian ini menggunakan uji dua arah, maka nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = 47$ (di dapat dari rumus $df = n - k = 50 - 3 = 47$). Jadi t_{tabel} , adalah 2,011. Berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,465 > 2,011), memiliki tingkat signifikan 0,014. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa hipotesis (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, berarti secara parsial ada pengaruh yang signifikan pada variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X1). Terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).

2.Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Dari tabel 4.13 terlihat bahwa t_{hitung} untuk koefisien rasio efektivitas pad (X2) adalah 3,959, sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t_{test} , dengan $\alpha = 5\%$ atau sebesar 0,05. Karena dalam penelitian ini menggunakan uji dua arah, maka nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan $df = 47$ (di dapat dari rumus $df = n - k = 50 - 3 = 47$). Jadi, t_{tabel} adalah 2,011. Berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,959 > 2,011), memiliki tingkat signifikansi 0,022. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa hipotesis (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, berarti secara parsial ada pengaruh yang signifikan pada variabel rasio efektivitas pad (X2) terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat (Y).

Dari Pembahasan diatas dapat dilihat juga pada gambar kurva hiperbola sebagai berikut:



Sumber : data primer di olah penulis,2019

Hasil dari Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

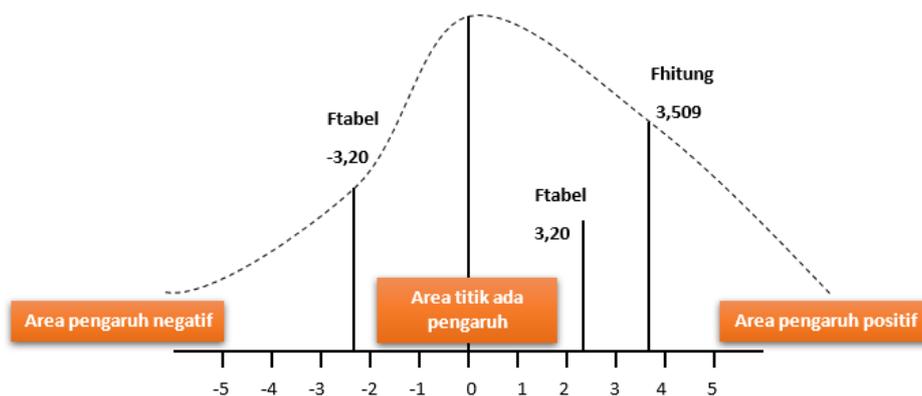
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	353,047	2	126,524	3,509	,015 ^b
	Residual	7451,133	27	32,152		
	Total	7804,180	29			

a. Dependent Variable: KesejahteraanMasyarakatY

b. Predictors: (Constant), RasioEfektivitasX2, RasioKemandirianX1

Sumber : data primer di olah penulis,2019

Gambar Kurva Hiperbola dari Uji F



Sumber : data primer di olah penulis,2019

Berdasarkan data hasil pengujian Uji Simultan (Uji F) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian SPSS diperoleh F_{hitung} sebesar 3,509 dengan taraf $\alpha = 0,05$. Derajat kebebasan pembilang atau df_1 dengan rumus $k - 1 = 3 - 1 = 2$, dimana k adalah jumlah variabel bebas dan terikat. Sedangkan derajat kebebasan penyebut atau df_2 dengan rumus $n - k = 50 - 3 = 47$, maka $F_{tabel} = 3,20$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$

(3,509 > 3,20). Dengan demikian H_a diterima, ini menunjukkan bahwa secara simultan antara variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X_1), dan rasio efektivitas pad (X_2) secara bersama-sama merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) yang merupakan variabel terikat.

2. Berdasarkan hasil pengujian SPSS diperoleh nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,015. Dimana disyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5% atau sebesar 0,05. Karena nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,015 < 0,05$ maka (H_0) ditolak dan (H_a) diterima. Ini menunjukkan bahwa antara variabel bebas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) dan rasio efektivitas pad (X_2) secara bersama-sama merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) yang merupakan variabel terikat.

Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H_1), dan hipotesis 2 (H_2) yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas pad secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil hipotesis yaitu (H_a) diterima yang dapat diartikan bahwa adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y . Pengaruh dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari ketiga hipotesis tersebut dapat dilihat bahwa hipotesis 2 (H_2) yaitu rasio efektivitas pad paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan keterangan angka paling besar yaitu sebesar 3,959 dari pada hipotesis 1 (H_1) yaitu sebesar 3,465, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa kureksari lebih menonjol pada rasio efektivitas pad (H_2) dari pada rasio kemandirian keuangan daerah (H_1), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kesimpulan Uji Hipotesis

Keterangan	Hipotesis	Hasil
H1	Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan keterangan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,465 > 2,011)	Ha Diterima
H2	Rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan keterangan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,959 > 2,011)	Ha Diterima
H1 dan H2	Rasio kemandirian keuangan daerah dan Rasio efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan keterangan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3,509 > 3,20)	Ha Diterima

Sumber : data primer di olah penulis, 2019

Keterangan:

*2,011 = di dapatkan dari rumus Uji $t = df = n - k$ (50 - 3 = 47)

(n = jumlah responden, k = jumlah variabel)

Untuk t_{tabel} , karena uji dua arah dan dengan pengujian hipotesis $\alpha = 5\%$ atau sebesar 0,05, maka dapat dilihat pada tabel Titik Persentase Distribusi t , pada kolom ke lima, sedangkan df nya dilihat pada angka 47, nilai tabel $t = 2,011$

*3,20 = di dapatkan dari rumus Uji F = $df_1 = k - 1$ maka = $df_1 = 3 - 1 = 2$. $df_2 = n - k$ maka = $df_2 = 50 - 3 = 47$

Untuk F_{tabel} , pengujian hipotesis dengan $\alpha = 5\%$ atau sebesar 0,05, maka dapat dilihat pada tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05, pada kolom 2 (N_1) dan angka 47 (N_2), nilai tabel F = 3,20

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Uji Kelayakan Model pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Menunjukkan bahwa model tersebut layak dalam penelitian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan besarnya nilai F_{hitung} 3,509 dan signifikan sebesar 0,015. Ini membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini berarti bahwa Rasio Kemandirian Keuangan yang tinggi juga dapat menaikkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, dikarenakan semakin tinggi nilai rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini berarti bahwa Rasio Efektivitas PAD yang tinggi juga dapat menaikkan kualitas publik layanan masyarakat, di karenakan semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD, maka sangat efektif pula hubungan rasio efektivitas PAD dengan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggantungkan dari hasil kuesioner, tetapi juga melakukan wawancara mendalam kepada setiap responden sehingga memperoleh data yang lebih akurat
2. Penelitian mendatang diharapkan dapat menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan memperluas bahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan perbandingan guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
3. Untuk Kepala Desa Kureksari sebaiknya mempertahankan layanan publik yang baik kepada Masyarakat, agar dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Kepala Desa Kureksari hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah terutama disektor PAD. Penggalan sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Andhiantoko, H 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agustina, E., E. Rochaida, dan Y. Ulfah. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* Vol 12(2).
- Aliyah, S. Dan A. Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* Vol 8 No 2.
- Amani, S. N. Dan N. M. I. Dariwardani. 2009. Kinerja Provinsi Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. www.artikel.com Diakses tanggal 8 oktober 2017.
- Anggraini, T. Dan Sutaryo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Bisma, I, D, G. Dan H. Susanto. (2010). "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2997" *Jurnal GaneC Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3.
- Ghozali, I.2006.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____.2007.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A.2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.Jakarta.
- Kuncoro, M 2007. *Metode penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi kedua. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi.2007.*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Ekstusif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*.UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- _____.2010.*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Ekstusif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*.Edisi Kedua. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Mahsun, M.2012 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.BPFE. Yogyakarta.
- Pambudi, S. B. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 2006 Tentang *Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah*.

- Pramita, P. R. 2015. Analisis rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kabumen Tahun 2009 – 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2011. *Reseach Methods For business*. Edisi 1 dan 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Sularso dan Restianto.2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.*Media Riser Akuntansi* Vol. 1 No.2.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*.
_____. Nomor 25 tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wijayanti, Y.2017. Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamid, A. A.2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas* Vol.1 No.4.
- Lazyra, KS.2016. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Ramadhani, Febby. R.2016. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.14 No.1.
- Harliyani, E. M. Dan Haryadi.2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.3 No.3.
- Gousario, Freska. Dan Dharmastuti C.F.2015 Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of level I Region. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.16 No.2.